

Analisis risiko pengenaan sanksi administrasi perpajakan akibat kealpaan penyampaian penghasilan dari luar negeri milik ekspatriat = Analysis of tax penalties risk to be imposed due to the absent of expatriate's overseas income declaration

Raymondus Bramantya, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20479328&lokasi=lokal>

Abstrak

Laporan ini membahas mengenai risiko sanksi administrasi perpajakan berupa denda yang timbul akibat kealpaan pengungkapan penghasilan dari luar negeri milik ekspatriat di PT RBA Indonesia. Kealpaan ini terjadi selama tahun pajak 2013 sampai dengan tahun 2016. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara keuangan, pilihan untuk menunggu penerbitan SKPKB lebih menguntungkan dibandingkan dengan pilihan untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi SPT Tahunan PPh OP . Hal tersebut dikarenakan adanya jangka waktu pembatasan periode pengenaan denda. Namun demikian, keputusan untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh OP akan menghindarkan PT RBA Indonesia dari potensi adanya pengenaan sanksi pidana perpajakan, sehingga dari perspektif perpajakan pilihan ini menjadi pilihan yang lebih baik untuk dilakukan oleh PT RBA Indonesia dibandingkan pilihan untuk menunggu penerbitan SKPKB. Bila perusahaan memilih melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh OP, maka penggunaan metode net untuk penghitungan penghasilan ekspatriat akan memberikan penghematan pada arus kas keluar dibandingkan penggunaan metode gross up dalam penghitungan tunjangan pajak yang diberikan kepada ekspatriat.

<hr>

This report explains about tax penalties risk to be imposed due to the absence of expatriate's of PT RBA Indonesia overseas income declaration. These absences were occurred during 2013 until 2016 fiscal year. The result shows that based on financial measurement, the option to wait the tax authority to publish the Tax Underpayment Assessment Letter SKPKB is more beneficial than the option to voluntary amend the Individual Income Tax Return IITR , due to the limitation of sanction period. However, the option to revise the IITR will avoid PT RBA Indonesia from the chance to be suspected for doing tax crime, shall this be a better option from the perspective of taxation. If PT RBA Indonesia chooses to amend the IITR, the use of net method in calculating the expatriate income will better off in saving the cash outflow compares to the use of gross up method.